ELMIRA: Journal of Educational Transformation
Volume x Number x, Month (2026) | Hal 84-94
DOI:



Rekonstruksi Otoritas Keagamaan Digital dalam Produksi Pengetahuan Islam Berbasis Generative AI

Jaswadi[1], Nur Latifah[2]
[1]Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
Email: jaswadi0480@gmail.com[1]

Kata kunci:
Otoritas Keagamaan Digital; Generative AI; Epistemologi Islam; Kredibilitas Informasi; Tabayyun

Abstrak

Generative Artificial Intelligence (GenAI) mengubah cara masyarakat mengakses, menyusun, dan menyebarkan pengetahuan Islam. Namun, kelancaran sistem menghasilkan jawaban tidak dengan sendirinya memberikan legitimasi keagamaan. Artikel ini bertujuan menganalisis perubahan otoritas keagamaan dalam produksi pengetahuan Islam berbasis GenAI, mengkaji hubungan antara validitas epistemik, kredibilitas informasi, dan kepercayaan pengguna, serta mengembangkan model rekonstruksi otoritas keagamaan digital. Penelitian menggunakan kajian literatur konseptual-kritis dengan menelaah teori otoritas, mediatization of religion, kredibilitas sumber, epistemologi Islam, literatur GenAI, dan publikasi mutakhir tentang AI dalam konteks keagamaan. Analisis dilakukan melalui pengelompokan tematik, perbandingan konsep, kritik epistemik, dan sintesis konseptual. Artikel ini mengajukan pembedaan antara kapasitas generatif, kredibilitas komunikatif, dan legitimasi keilmuan. Model yang diusulkan memuat tiga lapisan, yaitu produksi pengetahuan yang dimediasi AI, validasi epistemik berbasis sumber dan kompetensi keilmuan, serta legitimasi dan akuntabilitas manusia. Artikel menyimpulkan bahwa GenAI lebih tepat diposisikan sebagai perangkat bantu epistemik, bukan pemegang otoritas agama yang mandiri. Legitimasi pengetahuan Islam tetap memerlukan keterlacakan sumber, ketepatan interpretasi, tabayyun, amanah, dan tanggung jawab ulama serta pengguna.

OPEN ACCESS

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 3.0 International License (CC BY 3.0)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Generative Artificial Intelligence (GenAI) memperluas cara masyarakat memperoleh informasi dan penjelasan keagamaan. Model bahasa besar dapat merangkum teks, menjawab pertanyaan, membandingkan pandangan, menerjemahkan istilah, dan menyusun penjelasan dalam bahasa yang mudah dipahami. Pengguna dapat mengakses fungsi tersebut tanpa harus menelusuri banyak kitab atau laman secara terpisah. Kemudahan ini mengubah bukan hanya saluran distribusi pengetahuan Islam, tetapi juga kondisi sosial ketika suatu jawaban dianggap meyakinkan dan layak dipercaya.

Perubahan tersebut perlu dibaca dalam sejarah digitalisasi otoritas keagamaan. Campbell (2007) menunjukkan bahwa internet mendorong peneliti membedakan lapisan otoritas, termasuk struktur, peran, ideologi, dan teks. Kajian

Campbell (2010) tentang blog keagamaan juga memperlihatkan bahwa media digital tidak selalu menghapus otoritas tradisional. Aktor digital dapat menguatkan, menafsirkan ulang, atau menantang sumber otoritas yang telah ada. Hjarvard (2011) menambahkan bahwa media tidak sekadar menjadi saluran netral. Logika media dapat membentuk cara agama hadir, dikomunikasikan, dan diterima dalam kehidupan sosial.

GenAI membawa perubahan yang berbeda dari media digital sebelumnya. Mesin pencari umumnya mengarahkan pengguna kepada dokumen atau sumber yang tersedia. Sebaliknya, model generatif menyusun jawaban baru melalui pemrosesan pola bahasa dari data pelatihan dan konteks prompt. Pengguna menerima narasi yang tampak utuh, koheren, dan responsif, meskipun sistem tidak selalu menunjukkan asal setiap klaim. Kondisi ini menciptakan jarak antara kefasihan bahasa dan validitas substansi. Bender et al. (2021) mengingatkan bahwa model bahasa dapat menghasilkan bentuk bahasa yang meyakinkan tanpa pemahaman manusiawi atas makna. Ji et al. (2023) juga memetakan masalah halusinasi dalam generasi bahasa, termasuk keluaran yang tidak sesuai fakta atau tidak didukung sumber.

Terdapat dalam konteks Islam, masalah tersebut memiliki dimensi epistemik dan normatif. Pengetahuan agama tidak hanya dinilai berdasarkan kelancaran penjelasan. Pengetahuan juga berhubungan dengan sumber, metode penafsiran, kompetensi, konteks, tradisi keilmuan, dan tanggung jawab penyampaiannya. Al-Attas (1995) menempatkan ilmu dalam pandangan alam Islam yang terkait dengan kebenaran, adab, dan tatanan makna. Karena itu, jawaban yang tampak benar secara linguistik belum tentu memenuhi syarat sebagai pengetahuan agama yang sahih. Persoalan ini semakin penting ketika sistem menghasilkan rujukan ayat, hadis, atau pendapat ulama yang perlu diperiksa kembali.

Literatur mutakhir mulai mengkaji hubungan GenAI dan otoritas keagamaan. Belhassen et al. (2025) membahas batas epistemik dan etis AI dalam yurisprudensi Islam. Mustopa et al. (2026) menempatkan ChatGPT dalam kerangka epistemologi Islam dan mengusulkan hierarki otoritas yang tetap menempatkan ulama sebagai kurator. Jan (2026) membandingkan fatwa yang dihasilkan AI dengan fatwa manusia dan menyoroti keterbatasan AI dalam penalaran hukum Islam. Ahmed et al. (2026) juga menegaskan perbedaan antara kemampuan komputasional dan legitimasi ijtihad. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa isu ini telah berkembang dan artikel ini tidak mengklaim sebagai kajian pertama tentang AI dan otoritas keagamaan.

Publikasi tahun 2026 memperluas diskusi ke ranah mediasi, adab, dan tata kelola. Lim (2026) membahas kemungkinan terbentuknya karisma generatif dalam praktik keagamaan. Lohlker dan Wahid (2026) mengkaji transformasi otoritas Islam melalui interaksi aktor manusia, media digital, dan sistem algoritmik. Ahmad dan Ghafar (2026) menguraikan batas pembentukan otoritas interpretatif ketika mesin memproses teks suci. Santoso dan Adinata (2026) mengaitkan GenAI dengan adab transmisi pengetahuan, termasuk sanad, suhbah, tawaqquf, ikhtilaf, dan akuntabilitas. Kajian tentang pemahaman AI terhadap agama juga menunjukkan perlunya menilai secara kritis pendekatan moralistik yang dihasilkan sistem (Tsuria & Tsuria, 2024).

Meskipun demikian, masih diperlukan kerangka yang secara eksplisit memisahkan tiga persoalan yang sering tercampur dalam diskusi: kemampuan sistem menghasilkan informasi, kredibilitas pesan yang diterima pengguna, dan legitimasi keilmuan untuk menyampaikan pengetahuan agama. Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak identik. Jawaban AI dapat terlihat kredibel karena cepat, runtut, dan menggunakan istilah keagamaan. Akan tetapi, penilaian kredibilitas komunikatif tidak otomatis membuktikan ketepatan dalil atau legitimasi penafsiran.

Teori kredibilitas sumber Hovland dan Weiss (1951) membantu menjelaskan pengaruh persepsi terhadap sumber, tetapi teori tersebut tidak cukup untuk menentukan validitas epistemik dalam tradisi Islam.

Artikel ini mengembangkan argumen bahwa rekonstruksi otoritas keagamaan digital perlu bergerak dari pertanyaan siapa yang menghasilkan jawaban menuju pertanyaan bagaimana pengetahuan memperoleh legitimasi. Fokusnya bukan memberikan status ulama kepada AI, melainkan merumuskan kondisi ketika sistem AI dapat membantu produksi pengetahuan tanpa menggantikan tanggung jawab keilmuan manusia. Artikel ini memiliki lima tujuan: menganalisis perubahan konstruksi otoritas; mengidentifikasi mekanisme produksi dan penyajian pengetahuan Islam oleh GenAI; menjelaskan hubungan otoritas, kredibilitas, dan kepercayaan; mengevaluasi penggunaan GenAI melalui epistemologi dan komunikasi Islam; serta mengembangkan model konseptual rekonstruksi otoritas keagamaan digital.

Kontribusi artikel terletak pada model tiga lapisan yang menghubungkan mediasi teknologi, validasi epistemik, serta legitimasi dan akuntabilitas. Model ini memperluas pembahasan yang berfokus pada kemampuan AI atau hierarki otoritas dengan menempatkan keterlacakan sumber dan pertanggungjawaban sebagai penghubung antara produksi informasi dan penerimaan sosial. Artikel ini juga mengusulkan prinsip operasional yang dapat digunakan oleh pengembang, lembaga keagamaan, pendidik, dan pengguna untuk menilai konten Islam yang dihasilkan GenAI.

2. METODE

Artikel ini menggunakan kajian literatur konseptual-kritis (critical conceptual literature review). Desain ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu membandingkan konsep, mengidentifikasi ketegangan teoretis, dan menyusun sintesis konseptual. Artikel ini tidak mengklaim sebagai systematic literature review (SLR) karena penulis tidak menyajikan protokol pencarian lengkap, proses deduplikasi, jumlah rekaman, alasan eksklusi per dokumen, atau penilaian risiko bias yang dapat direplikasi. PRISMA 2020 menjadi acuan pelaporan untuk SLR dan tidak digunakan untuk memberi label sistematis pada kajian ini (Page et al. 2021; Hariani & Jabbar, 2026).

Unit analisis mencakup publikasi ilmiah, buku akademik, dan dokumen kelembagaan yang membahas lima ranah: (1) otoritas keagamaan dan agama digital; (2) GenAI dan model bahasa besar, (3) epistemologi Islam dan otoritas keilmuan, (4) kredibilitas informasi dan kepercayaan, serta (5) etika dan tata kelola AI. Literatur klasik dipakai untuk membangun konsep dasar, sedangkan publikasi 2021–2026 diprioritaskan untuk menjelaskan perkembangan GenAI dan diskursus kontemporer.

Penelusuran eksploratif dilakukan melalui laman penerbit dan jurnal ilmiah, indeks bibliografis yang dapat diakses, repositori akademik, serta dokumen resmi. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi digital religious authority, generative artificial intelligence, Islamic knowledge production, Islamic epistemology, religious information credibility, AI and religious authority, otoritas keagamaan digital, dan produksi pengetahuan Islam. Penelusuran difokuskan pada publikasi yang secara langsung membahas hubungan antara AI, pengetahuan agama, legitimasi, kredibilitas, atau etika komunikasi.

Literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansi konseptual, kejelasan identitas publikasi, keterlacakan metadata, dan kontribusinya terhadap pertanyaan penelitian. Artikel jurnal, buku akademik, prosiding ilmiah, serta

dokumen lembaga standar dipertimbangkan sesuai fungsi masing-masing. Sumber yang hanya membahas penerapan AI secara umum tanpa kaitan yang jelas dengan otoritas, epistemologi, atau komunikasi agama tidak menjadi dasar utama argumentasi. Metadata referensi diperiksa melalui halaman penerbit, DOI, atau katalog institusi apabila tersedia.

Analisis dilakukan melalui lima tahap. Pertama, analisis isi untuk mengidentifikasi definisi, klaim, dan konsep utama. Kedua, analisis tematik untuk mengelompokkan literatur ke dalam tema otoritas, mediasi, validitas, kredibilitas, dan akuntabilitas. Ketiga, analisis komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan antar teori. Keempat, analisis kritis untuk menguji asumsi yang menyamakan kefasihan bahasa dengan kebenaran atau kepercayaan dengan legitimasi. Kelima, sintesis konseptual untuk merumuskan model tiga lapisan dan proposisi analitis.

Meningkatkan penjagaan keterlacakan, setiap konsep ditempatkan dalam matriks yang menghubungkan tema, pertanyaan analisis, dan implikasi bagi model. Analisis tidak menghitung frekuensi kemunculan tema sebagai ukuran prevalensi. Karena itu, hasil artikel berupa sintesis argumentatif, bukan estimasi kuantitatif atas seluruh publikasi. Penelusuran yang dilakukan juga tidak menghasilkan dasar untuk menyatakan bahwa semua basis data Scopus dan Web of Science telah ditelusuri secara menyeluruh. Pembatasan ini dinyatakan agar pembaca tidak menafsirkan artikel sebagai SLR yang lengkap.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Otoritas Keagamaan dalam Lingkungan Digital

Otoritas keagamaan merujuk pada pengakuan sosial dan keilmuan terhadap pihak yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, atau memberi arahan mengenai ajaran agama. Otoritas tidak hanya bersumber dari jabatan formal. Otoritas juga tumbuh melalui penguasaan ilmu, pengakuan komunitas, kesinambungan tradisi, integritas moral, dan kemampuan memberi alasan yang dapat diuji. Weber (1978) menjelaskan legitimasi sebagai dasar penerimaan atas kekuasaan atau kepemimpinan. Kerangka Weber berguna untuk membaca proses pengakuan sosial, tetapi tidak dapat digunakan sendirian untuk menentukan kebenaran ajaran Islam.

Ruang digital mengubah kondisi pembentukan otoritas karena visibilitas, kecepatan distribusi, interaksi, dan metrik popularitas ikut memengaruhi jangkauan pesan. Campbell (2007, 2010) menunjukkan bahwa otoritas digital perlu dianalisis melalui relasi antara aktor, struktur, ideologi, dan teks. Hjarvard (2011) menjelaskan bahwa logika media dapat membentuk representasi dan pengalaman agama. Dengan demikian, media bukan hanya memindahkan ceramah atau fatwa ke ruang daring, tetapi turut membentuk cara publik menemukan dan menilai sumber keagamaan.

GenAI menambahkan bentuk mediasi yang lebih intensif. Sistem tidak hanya menampilkan konten yang telah dibuat manusia, tetapi menyusun jawaban berdasarkan prompt dan pola yang dipelajari. Pengguna dapat mengalami seolah-olah sedang berdialog dengan sumber yang mengetahui banyak hal. Respons yang personal dan segera dapat membangun persepsi kedekatan serta kompetensi. Lim (2026) menyebut dinamika ini sebagai kemungkinan munculnya karisma generatif dalam praktik keagamaan. Namun, karisma yang muncul dari pengalaman interaksi tidak identik dengan otoritas keilmuan yang memiliki dasar metodologis

dan tanggung jawab moral.

Karena itu, artikel ini membedakan otoritas institusional, otoritas epistemik, dan pengaruh komunikatif. Otoritas institusional terkait pengakuan lembaga atau komunitas. Otoritas epistemik terkait kompetensi, metode, dan kemampuan mempertanggungjawabkan pengetahuan. Pengaruh komunikatif terkait kemampuan menarik perhatian dan membangun kepercayaan. GenAI dapat memperkuat pengaruh komunikatif melalui aksesibilitas dan kefasihan, tetapi tidak otomatis memperoleh dua bentuk otoritas lainnya. Pembedaan ini menjadi dasar untuk mencegah penyamaan antara popularitas jawaban dan legitimasi agama.

3.2. GenAI sebagai Perantara Produksi Pengetahuan Islam

GenAI bekerja dengan memproses pola dalam data dan menghasilkan keluaran berdasarkan konteks masukan. Dalam penggunaan keagamaan, sistem dapat membantu pencarian awal, peringkasan literatur, penerjemahan, pemetaan perbedaan pendapat, dan penyusunan materi penjelasan. Kemampuan tersebut dapat memperluas akses pengetahuan, terutama bagi pengguna yang menghadapi hambatan bahasa atau keterbatasan waktu. Kasneci et al. (2023) menunjukkan bahwa model bahasa menawarkan peluang untuk mendukung pembelajaran, tetapi memerlukan literasi, pemeriksaan fakta, dan pengawasan manusia.

Keluaran generatif tidak selalu mengungkap jalur asal informasi. Sistem dapat menggabungkan fragmen dari berbagai sumber, menghasilkan sitasi yang tidak tepat, menghilangkan konteks, atau menyajikan pendapat yang diperdebatkan seolah-olah tunggal. Ji et al. (2023) menjelaskan bahwa halusinasi merupakan persoalan penting dalam natural language generation. Farquhar et al. (2024) mengembangkan pendekatan deteksi ketidakpastian semantik karena model bahasa dapat memberikan jawaban yang keliru dengan tingkat keyakinan yang tampak tinggi. Kalai et al. (2026) juga menunjukkan bahwa insentif evaluasi akurasi dapat mendorong keluaran yang tampak meyakinkan meskipun sistem belum memiliki dasar yang memadai.

Produksi dalam pengetahuan Islam, persoalan tersebut menuntut pembedaan antara retrieval, synthesis, interpretation, dan normative judgement. Retrieval berarti menemukan sumber. Synthesis berarti merangkum atau membandingkan bahan. Interpretation berarti menjelaskan makna berdasarkan metode tertentu. Normative judgement berarti menetapkan arahan atau hukum untuk konteks tertentu. GenAI dapat membantu dua proses awal jika sumbernya tersedia dan diperiksa. Pada dua proses berikutnya, terutama penilaian normatif, keterlibatan ahli menjadi sangat penting karena proses tersebut membutuhkan kompetensi, konteks, pertimbangan tujuan syariat, dan tanggung jawab.

Penelitian Belhassen et al. (2025), Jan (2026), dan Ahmed et al. (2026) memperlihatkan bahwa penggunaan AI dalam penalaran hukum Islam perlu dibatasi oleh kompetensi manusia dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan-temuan tersebut tidak berarti bahwa AI tidak berguna. AI dapat berfungsi sebagai asisten pencarian dan pengorganisasian argumen. Batasnya muncul ketika keluaran sistem diperlakukan sebagai fatwa atau keputusan agama yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, nilai guna teknis tidak sama dengan kewenangan normatif.

3.3. Epistemologi Islam dan Validitas Pengetahuan

Epistemologi Islam menempatkan sumber, cara memperoleh, dan tujuan pengetahuan dalam hubungan dengan pandangan alam Islam. Al-Attas (1995)

menekankan keterkaitan ilmu dengan kebenaran dan adab. Dalam kerangka ini, pengetahuan bukan sekadar informasi yang tersusun secara logis. Pengetahuan juga harus ditempatkan secara benar dalam tatanan makna dan tanggung jawab manusia. Kerangka tersebut relevan untuk menilai GenAI karena sistem dapat menghasilkan informasi tanpa memiliki kesadaran moral atau tanggung jawab keagamaan sebagaimana manusia.

Kebutuhan analisis, artikel ini menggunakan tiga kategori epistemik. Pertama, validitas sumber, yaitu apakah klaim dapat ditelusuri ke sumber yang dapat diperiksa. Kedua, validitas metodologis, yaitu apakah proses penafsiran atau penalaran mengikuti kaidah disiplin yang relevan. Ketiga, validitas kontekstual, yaitu apakah penjelasan mempertimbangkan konteks pertanyaan, perbedaan pendapat, dan keadaan yang memengaruhi penerapan pengetahuan. Ketiga kategori ini tidak menggantikan disiplin ilmu Islam, tetapi membantu mengoperasionalkan pemeriksaan awal terhadap keluaran AI.

Prinsip tabayyun memberi landasan normatif bagi pemeriksaan informasi. QS. Al-Hujurat [49]: 6 memerintahkan verifikasi berita agar seseorang tidak mengambil tindakan yang merugikan karena ketidaktahuan. Dalam konteks digital, tabayyun dapat diterapkan dengan memeriksa asal kutipan, mencocokkan teks ayat atau hadis dengan sumber primer, memastikan atribusi pendapat ulama, dan meminta penjelasan ahli ketika persoalan mengandung perbedaan hukum. Tabayyun tidak cukup dimaknai sebagai tombol verifikasi teknis. Prinsip ini juga menuntut sikap kritis, kehati-hatian, dan tanggung jawab sebelum menerima atau menyebarkan informasi.

Konsep sanad memperkuat pentingnya keterlacakan transmisi pengetahuan. Sanad dalam tradisi hadis memiliki struktur keilmuan yang spesifik dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan metadata atau tautan digital. Namun, nilai keterlacakan sanad memberi pelajaran bahwa klaim keagamaan memerlukan jalur atribusi yang dapat diperiksa. Karena itu, artikel ini menggunakan istilah provenance atau provenans untuk menyebut asal-usul dan jejak sumber informasi, bukan untuk menggantikan konsep sanad. Provenans digital membantu pengguna mengetahui dari dokumen mana suatu klaim berasal, sedangkan penilaian sanad dan kualitas periwayatan tetap mengikuti disiplin ilmu hadis.

Amanah ilmiah menjadi prinsip berikutnya. Pihak yang menyampaikan pengetahuan perlu menjelaskan batas kompetensi, tidak menyembunyikan ketidakpastian, tidak mengubah pendapat menjadi kepastian, dan tidak mengatribusikan klaim kepada ulama tanpa bukti. Sistem AI sendiri tidak memikul tanggung jawab moral seperti manusia. Tanggung jawab tetap berada pada pengembang, penyedia layanan, lembaga yang mengadopsi sistem, ahli yang memvalidasi, dan pengguna yang menyebarkan keluaran. NIST (2024) menekankan manajemen risiko GenAI melalui tata kelola, pemetaan, pengukuran, dan pengelolaan risiko. Prinsip tersebut dapat dipertemukan dengan amanah untuk merumuskan akuntabilitas yang sesuai dengan konteks Islam.

3.4. Kredibilitas Informasi, Kepercayaan, dan Legitimasi

Teori kredibilitas sumber menjelaskan bahwa penerimaan pesan dipengaruhi oleh persepsi terhadap sumber. Hovland dan Weiss (1951) menunjukkan bahwa penilaian terhadap keterpercayaan sumber memengaruhi penerimaan komunikasi. Dalam lingkungan GenAI, persepsi kredibilitas dapat tumbuh dari respons yang cepat, struktur jawaban yang rapi, penggunaan istilah Arab, dan penyebutan dalil. Unsur tersebut dapat meningkatkan kesan kompeten, tetapi tidak menjamin akurasi. Karena itu, kredibilitas yang dirasakan pengguna

harus dibedakan dari validitas isi.

Kepercayaan pengguna juga bersifat kontekstual. Pengguna mungkin mempercayai AI untuk menerjemahkan istilah atau merangkum artikel, tetapi tidak untuk menentukan hukum dalam masalah keluarga, ibadah, atau transaksi. Tingkat risiko pertanyaan perlu memengaruhi tingkat verifikasi. Informasi deskriptif yang sederhana memerlukan pemeriksaan sumber yang memadai. Penjelasan tafsir atau fikih membutuhkan pemeriksaan metode dan konteks. Fatwa personal atau keputusan yang berdampak besar memerlukan rujukan kepada ulama atau lembaga yang memiliki kompetensi dan mandat.

Literatur tentang GenAI mengingatkan bahwa kepercayaan berlebihan dapat muncul ketika pengguna tidak memahami keterbatasan model. Kasneci et al. (2023) menekankan pentingnya literasi dan pemeriksaan fakta. Autio et al. (2024) melalui profil risiko GenAI NIST mendorong organisasi mengelola risiko berdasarkan konteks penggunaan. Ahmad dan Ghafar (2026) memperlihatkan bahwa interpretasi teks suci dalam lingkungan AI menimbulkan pertanyaan tentang batas peran mesin dan legitimasi penafsir. Dengan demikian, kepercayaan yang bertanggung jawab harus dibangun melalui transparansi, penjelasan keterbatasan, dan mekanisme koreksi.

Hubungan ketiga konsep dapat dirumuskan sebagai berikut. Kredibilitas komunikatif memengaruhi kemungkinan pengguna menerima pesan. Validitas epistemik menentukan apakah isi pesan memiliki dasar pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Legitimasi keagamaan menentukan apakah pihak yang menyampaikan atau mengesahkan pesan memiliki kompetensi dan pengakuan yang relevan. Ketiganya dapat saling mendukung, tetapi tidak dapat saling menggantikan. Pengguna dapat mempercayai jawaban yang salah; jawaban yang benar dapat berasal dari sumber yang tidak berwenang; dan sumber yang berwenang tetap perlu menyampaikan alasan serta bukti.

3.5. Rekonstruksi Otoritas Keagamaan Digital: Model Tiga Lapisan

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini mengusulkan Model Rekonstruksi Otoritas Keagamaan Digital (MROKD). Model ini menempatkan GenAI sebagai perantara dalam produksi informasi, sedangkan legitimasi pengetahuan ditentukan melalui validasi epistemik dan pertanggungjawaban manusia. Model terdiri atas tiga lapisan yang saling terhubung.

Tabel 1. Lapisan rekonstruksi otoritas keagamaan digital

Lapisan	Komponen utama	Fungsi konseptual
1. Produksi pengetahuan	Al-Qur'an, hadis, kitab turats, karya ulama, literatur akademik, korpus digital, dan GenAI	Menghasilkan, mengambil, merangkum, menerjemahkan, serta menyajikan informasi.
2. Validasi epistemik	Provenans sumber, ketepatan kutipan, metode disiplin, konteks, tabayyun, kompetensi ahli	Menguji asal-usul, akurasi, cara penalaran, dan kesesuaian konteks.
3. Legitimasi dan akuntabilitas	Pengakuan keilmuan, otoritas ulama/lembaga, amanah, keterbukaan, tanggung jawab pengguna	Menentukan siapa yang berwenang mengesahkan dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan serta penyebaran.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Lapisan pertama menggambarkan proses produksi informasi. Sumber Islam

dan literatur akademik menjadi bahan rujukan, sementara GenAI berfungsi sebagai alat untuk mengolah dan menyajikan informasi. Pada tahap ini, keluaran belum dapat diperlakukan sebagai pengetahuan yang tervalidasi. Sistem perlu menampilkan sumber dan batasan yang jelas. Jika sistem tidak dapat menunjukkan asal klaim, pengguna harus memperlakukannya sebagai informasi awal yang membutuhkan pemeriksaan.

Lapisan kedua menjadi mekanisme pengujian. Pemeriksaan dimulai dari provenans, yakni penelusuran dokumen atau sumber yang mendasari jawaban. Selanjutnya, pemeriksa menilai akurasi kutipan, konteks, metode penalaran, dan kesesuaian dengan disiplin ilmu. Tabayyun berfungsi sebagai prinsip kehati-hatian dan verifikasi. Kompetensi ahli diperlukan ketika pertanyaan menyentuh tafsir, hadis, fikih, akidah, atau persoalan yang memiliki konsekuensi normatif. Lapisan ini menghubungkan keluaran teknis dengan standar pengetahuan Islam.

Lapisan ketiga mengatur legitimasi dan akuntabilitas. Validasi teknis belum cukup untuk memberikan kewenangan agama kepada sistem. Otoritas keilmuan tetap melekat pada manusia dan lembaga yang memiliki kompetensi, tradisi pembelajaran, pengakuan, serta tanggung jawab. AI dapat membantu ahli, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab mereka. Pengguna juga memikul tanggung jawab untuk tidak menyebarkan jawaban tanpa pemeriksaan, terutama ketika jawaban berpotensi memengaruhi keputusan keagamaan orang lain.

Model ini menghasilkan proposisi konseptual. Pertama, semakin tinggi keterlacakan sumber, semakin terbuka peluang untuk memeriksa validitas informasi, tetapi keterlacakan saja tidak menjamin kebenaran interpretasi. Kedua, semakin tinggi risiko normatif suatu pertanyaan, semakin kuat kebutuhan terhadap validasi ahli dan pengesahan manusia. Ketiga, kredibilitas komunikatif tidak dapat digunakan sebagai proksi tunggal bagi legitimasi keagamaan. Keempat, akuntabilitas harus melekat pada seluruh rantai produksi dan distribusi, bukan hanya pada pengguna akhir. Proposisi ini merupakan hasil sintesis konseptual dan masih memerlukan pengujian empiris.

3.6. Prinsip Operasional Penggunaan GenAI untuk Pengetahuan Islam

Model tiga lapisan dapat diterjemahkan ke dalam enam prinsip operasional. Pertama, keterlacakan sumber. Sistem dan pengguna perlu mengutamakan sumber yang dapat diperiksa, menyertakan identitas dokumen, serta membedakan kutipan langsung dari ringkasan. Kedua, transparansi epistemik. Jawaban perlu menunjukkan apakah sistem sedang merangkum, membandingkan, atau menyimpulkan, serta menyatakan ketidakpastian ketika sumber tidak cukup. Ketiga, verifikasi kontekstual. Pengguna perlu memeriksa konteks ayat, hadis, pendapat fikih, dan kondisi yang melatarbelakangi pertanyaan.

Keempat, batas kewenangan. GenAI dapat membantu pencarian dan pembelajaran, tetapi tidak boleh dipresentasikan sebagai mufti atau otoritas mandiri. Kelima, supervisi manusia. Pertanyaan yang memerlukan interpretasi mendalam atau keputusan normatif harus melibatkan ahli yang kompeten. Keenam, akuntabilitas dan koreksi. Pengembang, institusi, ahli, dan pengguna perlu menyediakan mekanisme untuk melaporkan kesalahan, memperbaiki informasi, dan menelusuri keputusan yang diambil berdasarkan keluaran sistem. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan perhatian tata kelola risiko dalam NIST (2024) dan UNESCO (2021, 2023), sekaligus memberi isi kontekstual melalui tabayyun dan amanah.

Tabel 2. Klasifikasi risiko penggunaan

Tingkat penggunaan	Contoh aktivitas	Pengamanan minimum
Risiko rendah	Terjemahan istilah, ringkasan artikel, pencarian topik	Cantumkan sumber dan periksa akurasi dasar.
Risiko menengah	Perbandingan pendapat, penjelasan ayat/hadis, uraian konsep fikih	Periksa sumber primer, konteks, metode, dan perbedaan pendapat; libatkan ahli bila perlu.
Risiko tinggi	Fatwa personal, keputusan ibadah/keluarga/transaksi yang berdampak besar	Jangan jadikan AI sebagai penentu; rujuk ulama atau lembaga berwenang dan dokumentasikan pertimbangan.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Klasifikasi tersebut merupakan usulan analitis, bukan standar hukum yang telah disahkan lembaga keagamaan. Institusi dapat menyesuaikannya dengan bidang, tradisi mazhab, tata kelola, dan risiko penggunaan. Prinsip utamanya ialah memperkuat verifikasi seiring meningkatnya konsekuensi jawaban.

4. KESIMPULAN

Generative AI mengubah produksi dan distribusi pengetahuan Islam karena sistem dapat menyusun jawaban yang cepat, personal, dan meyakinkan. Perubahan ini memengaruhi kondisi pembentukan kredibilitas dan pengaruh keagamaan di ruang digital. Namun, kemampuan menghasilkan jawaban tidak otomatis memberikan legitimasi keilmuan. Kefasihan bahasa, kecepatan respons, dan kesan kompeten hanya menjelaskan sebagian dari penerimaan komunikatif, bukan validitas epistemik atau kewenangan agama.

Artikel ini mengembangkan Model Rekonstruksi Otoritas Keagamaan Digital yang terdiri atas tiga lapisan, yaitu produksi pengetahuan yang dimediasi GenAI, validasi epistemik, serta legitimasi dan akuntabilitas. Model menempatkan AI sebagai perangkat bantu epistemik. Pengetahuan Islam yang dihasilkan melalui AI tetap memerlukan keterlacakan sumber, ketepatan metode dan konteks, tabayyun, kompetensi ahli, amanah, serta tanggung jawab manusia. Semakin tinggi konsekuensi normatif suatu jawaban, semakin kuat kebutuhan terhadap supervisi dan pengesahan ahli.

Kontribusi utama artikel terletak pada pembedaan kapasitas generatif, kredibilitas komunikatif, validitas epistemik, dan legitimasi keagamaan dalam satu kerangka analitis. Model ini dapat menjadi dasar pengembangan pedoman kelembagaan, desain sistem, dan literasi AI keagamaan. Karena kajian ini bersifat konseptual dan belum menjalani pengujian empiris, penelitian berikutnya perlu menguji operasionalisasi model pada keluaran AI, praktik lembaga keagamaan, dan penerimaan pengguna.

5. REFERENSI

Ahmad, H., & Ghafar, N. A. (2026). Who speaks when machines read scripture: Boundary-making and interpretive authority in AI-mediated religious knowledge. *AI and Ethics, 6,* Article 463. https://doi.org/10.1007/s43681-026-01254-5

Ahmed, A., Masuwd, M., Sabir, M. R., & Mahmudulhassan, M. (2026). Can artificial

intelligence perform ijtihad? Authority, epistemology, and legitimacy in digital Islamic jurisprudence. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies, 38*(1), 154–169. https://doi.org/10.23917/suhuf.v38i1.16437

Al-Attas, S. M. N. (1995). Prolegomena to the metaphysics of Islam: An exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam. International Institute of Islamic Thought and Civilization.

AlMazaedh, I. A. I., Tahat, K. M. K., Alkhalaileh, M., & Tahat, D. N. (2026). Digital religion in platform societies: Authority, mediation, and social cohesion in algorithmic publics (2010–2025). *Frontiers in Sociology, 11*, Article 1802281. https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1802281

Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., Hall, P., & Roberts, K. (2024). Artificial intelligence risk management framework: Generative artificial intelligence profile (NIST AI 600-1). *National Institute of Standards and Technology*. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 610–623). *Association for Computing Machinery.* https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Belhassen, Y., Ali, A., & Hachicha, S. (2025). Algorithmic ijtihad and the reconfiguration of religious authority: Evaluating the epistemic and ethical boundaries of generative AI in Islamic jurisprudence. *International Journal of Noesantara Islamic Studies, 2*(2), 77–87. https://doi.org/10.70177/ijonis.v2i2.3287

Campbell, H. A. (2007). Who's got the power? Religious authority and the Internet. *Journal of Computer-Mediated Communication, 12*(3), 1043–1062. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00362.x

Campbell, H. A. (2010). Religious authority and the blogosphere. *Journal of Computer-Mediated Communication, 15*(2), 251–276. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2010.01519.x

Farquhar, S., Kossen, J., Kuhn, L., & Gal, Y. (2024). Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy. *Nature,* 630, 625–630. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07421-0

Hariani,P.E., & Jabbar, M.R.A.A. (2026). Research Approaches and Methods in Educational Management Studies: A Literature Review and Future Research Directions. *Journal of Policy Review and Innovation in Educational Management, 1*(1), 71-83.https://doi.org/10.56404/priem.v1i1.454

Hjarvard, S. (2011). The mediatisation of religion: Theorising religion, media and social change. *Culture and Religion, 12*(2), 119–135. https://doi.org/10.1080/14755610.2011.579719

Hovland, C. I., & Weiss, W. (1951). The influence of source credibility on communication effectiveness. *Public Opinion Quarterly, 15*(4), 635–650. https://doi.org/10.1086/266350

Jan, A. (2026). Digital authority and Islamic legal reasoning: A comparative study of AI-generated and human-issued fatāwā. *Online Journal of Research in Islamic Studies, 13*(1). https://doi.org/10.22452/ris.vol13no1.1

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys, 55*(12), Article 248. https://doi.org/10.1145/3571730

Kalai, A. T., Nachum, O., Vempala, S. S., & Zhang, E. (2026). Evaluating large language models for accuracy incentivizes hallucinations. *Nature*, 653, 1047–1051. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10549-w

Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., … Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences,* 103, Article 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274

Lim, F. K. G. (2026). AI and generative charisma in religious practices. *Religions, 17*(5), Article 549. https://doi.org/10.3390/rel17050549

Lohlker, R., & Wahid, S. H. (2026). The transformation of Islamic religious authority. *Religions, 17*(4), Article 493. https://doi.org/10.3390/rel17040493

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Santoso, D., & Adinata, P. R. (2026). The algorithmic ulama: Generative AI, religious authority, and the reconfiguration of adab in Indonesian Islamic communication. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature, 6*(1), 123–141. https://journal.jcopublishing.com/index.php/jcell/article/view/911

Tsuria, R., & Tsuria, Y. (2024). Artificial intelligence's understanding of religion: Investigating the moralistic approaches presented by generative artificial intelligence tools. *Religions, 15*(3), Article 375. https://doi.org/10.3390/rel15030375

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO.

UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.